

Kesenjangan Normatif-Empiris Implementasi Kurikulum Merdeka: Analisis Kritis Integrasi Nilai Islam dan Profil Pelajar Pancasila di SMP IT Al-Amanah Ciamis

Muhammad Sholeh Afif

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
msholehafif06@gmail.com

Fatnun Fajriyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
riyahfatnun@gmail.com

Putri Ulia Rahma

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
uliarahma203@gmail.com

Ni'matul Mahmudah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
nimatulma213@gmail.com

Abstract : Previous studies indicate that the implementation of the Merdeka Curriculum continues to exhibit disparities between policy design and educational practice across schools. These challenges are more pronounced in Integrated Islamic Schools located in rural areas, where the national curriculum must be aligned with institutional characteristics, religious values, and limited educational resources. Despite this context, comprehensive studies examining the interrelationship among curriculum philosophy, curriculum structure, instructional practices, assessment, the *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5), and institutional capacity remain limited. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum at SMP IT Al-Amanah, Ciamis Regency, by examining the alignment between curriculum design and its implementation in educational practice. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were obtained from the 2025/2026 School-Based Curriculum (*Kurikulum Satuan Pendidikan*), supported by a literature review. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, while source triangulation was employed to enhance the credibility of the findings. The findings reveal that the Merdeka Curriculum has been implemented through intraclass learning, the *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5), assessment based on the Learning Objective Achievement Criteria (*Kriteria Ketercapaian Tujuan*

Pembelajaran [KKTP]), and the integration of Fiqh as a subject reinforcing the school's Islamic identity. The curriculum's flexibility provides opportunities to adapt learning to students' characteristics and the local context. However, its effectiveness is still influenced by teachers' pedagogical capacity, limited learning facilities, and institutional support. These findings suggest that optimizing the implementation of the Merdeka Curriculum requires strengthening teachers' professional competence, improving educational infrastructure, and promoting adaptive and sustainable school governance.

Keywords: *Merdeka Curriculum, Curriculum Implementation, Islamic Integrated School, Pancasila Student Profile, Islamic Values.*

Abstrak : Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka masih menghadapi disparitas antara desain kebijakan dan praktik di satuan pendidikan. Persoalan tersebut semakin kompleks pada Sekolah Islam Terpadu di wilayah pedesaan yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan karakteristik kelembagaan, budaya religius, dan keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, kajian yang mengulas keterkaitan aspek filosofis, struktur kurikulum, pembelajaran, asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta faktor kelembagaan secara terpadu masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah Kabupaten Ciamis dengan menelaah kesesuaian antara desain kurikulum dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data bersumber dari dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 yang didukung studi kepustakaan. Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, sedangkan kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur Kurikulum Merdeka telah terimplementasi melalui pembelajaran intrakurikuler, P5, asesmen berbasis Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP), serta integrasi mata pelajaran Fiqh sebagai penguat identitas sekolah. Fleksibilitas kurikulum memberikan ruang bagi penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal. Efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kapasitas pedagogik guru, keterbatasan sarana pembelajaran, dan dukungan kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan penguatan kompetensi guru, penyediaan infrastruktur pendidikan, serta tata kelola sekolah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Implementasi Kurikulum; Sekolah Islam Terpadu; Profil Pelajar Pancasila; Nilai-nilai Islam.

Pendahuluan

Terdapat beberapa faktor yang membuat Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kebutuhan mendesak, di antaranya adalah perubahan sosial yang berlangsung tanpa henti, percepatan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta dunia yang menuntut sesuatu yang baru dari manusia abad ke-21. Termasuk dalam hal Pendidikan yang dituntut untuk bertransformasi terus-menerus setiap zaman. Wujud nyata dari pergeseran paradigma tersebut di Indonesia tampak ketika Kurikulum Merdeka mulai diperkenalkan kepada dunia secara bertahap sejak tahun 2022 yang menjadi tulang punggung kebijakan Merdeka Belajar. Di sana, terjadi pergeseran mendasar yaitu otoritas pengambilan keputusan instruksional tidak lagi terpusat, distribusi kewenangannya didesentralisasikan. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan dengan adanya tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu esensi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka terletak pada keterlibatan peserta didik dalam setiap tahapan pembelajaran sehingga pengetahuan diperoleh melalui proses eksplorasi, refleksi, dan pengalaman belajar. Guru berperan mengelola proses pembelajaran dengan menyediakan bimbingan, sumber belajar, serta dukungan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum telah merangkai beberapa unsur yang meliputi strategi pembelajaran berdiferensiasi, penguatan kompetensi bertaraf global maupun pengembangan karakter melalui kegiatan P5. Selain memproyeksikan sasaran jangka panjang, regulasi ini adalah sebagai langkah pemulihan pemerintah dalam menanggulangi degradasi capaian belajar (*learning loss*) sebagai dampak dari pandemi COVID-19, suatu kondisi yang pada akhirnya menggeser fokus pendidikan, dari yang semula menitikberatkan penguasaan konten kognitif semata menjadi pengembangan kompetensi, karakter, dan resiliensi global pada diri peserta didik (BSKAP, 2022; Fatmala et al., 2025).

Konstruktivisme menjadi akar epistemologis yang menopang Kurikulum Merdeka. Dalam kerangka ini, peserta didik bukan lagi objek pasif yang menerima

pengetahuan begitu saja. Mereka menjadi aktor epistemik, yakni pihak yang aktif membangun pemahamannya sendiri lewat interaksi dan pengalaman belajar yang bermakna. Pandangan humanistik memperkuat fondasi ini lebih jauh. Aktualisasi potensi unik tiap individu ditempatkan sebagai tujuan akhir pendidikan, sebagai teleologinya. Akibatnya, pola relasi dalam proses instruksional pun bergeser. Sebagaimana pada mulanya pembelajaran berpusat pada guru, kini bergerak ke ruang yang lebih luas yang diberikan melalui aktivitas eksploratif, konstruktif, dan reflektif yang dijalankan peserta didik sendiri.

Corak hubungan dalam proses instruksional pun bergeser. Pergeseran ini diterjemahkan lewat perpaduan sistemik beberapa elemen sekaligus asesmen formatif yang berjalan berkesinambungan, Capaian Pembelajaran (CP), diferensiasi instruksional, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), hingga kegiatan kokurikuler P5. Seluruhnya saling terkait serta secara bersamaan, elemen-elemen ini membentuk satu ekosistem pembelajaran yang utuh (Tyler, 1969; Wraga, 2017).

Kendati ditopang oleh argumentasi filosofis dan konseptual yang mapan, aktualisasi Kurikulum Merdeka di lapangan masih berhadapan dengan berbagai hambatan struktural. Berbagai studi empiris mengonfirmasi bahwa kesiapan pedagogis guru, disparitas infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta minimnya supervisi klinis dan pendampingan profesional menjadi determinan utama yang mereduksi efektivitas implementasi kurikulum ini. Guru kini dihadapkan pada disrupsi peran yang menuntut mereka menguasai materi subjek, piawai dalam memetakan kebutuhan belajar siswa, merancang asesmen autentik, mengintegrasikan teknologi instruksional, dan mengorkestrasi proyek kolaboratif lintas disiplin ilmu. Proses transisi paradigma ini membutuhkan restrukturisasi budaya akademik yang mendalam dan tidak dapat diakselerasi secara instan (Hunaepi & Suharta, 2024; Prasetya et al., 2024).

Kompleksitas hambatan tersebut eskalatif ketika kurikulum ini diimplementasikan di wilayah pedesaan. Keterbatasan sarana prasarana fisik, hambatan akses teknologi informasi, serta ketimpangan kompetensi guru menyebabkan fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka belum teraktualisasi secara optimal. Padahal, substansi dari kurikulum ini terletak pada otonomi sekolah untuk

mengontekstualisasikan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik dan ekosistem sosial budaya lokal. Dalam realitasnya, diskresi dan fleksibilitas kurikulum ini justru membutuhkan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) yang kokoh agar desentralisasi kurikulum tidak berujung pada penurunan mutu pembelajaran.

Dinamika dan paradoks implementasi ini tercermin secara jelas di SMP IT Al-Amanah Kabupaten Ciamis, sebuah lembaga pendidikan Islam swasta berbasis terpadu. Sekolah ini telah mengadopsi Kurikulum Merdeka yang tertuang dalam dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun Pelajaran 2025/2026. Berdasarkan dokumen KSP tersebut, institusi ini memformulasikan visi untuk mencetak lulusan yang Kreatif, Unggul, Agamis, dan Teladan (KUAT) dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai teologis-keislaman ke dalam struktur kurikulumnya. Internalisasi nilai tersebut diupayakan melalui sinergi antara program P5, aktivitas kepesantrenan, kurikulum muatan lokal, dan habituasi karakter religius. Karakteristik integratif ini menjadi distingsi sekaligus keunggulan komparatif SMP IT Al-Amanah dibanding sekolah umum, karena menawarkan sintesis harmonis antara standar kurikulum nasional dan nilai-nilai spiritualitas Islam (SMP IT AL-AMANAH, 2025).

Namun di sisi lain, dokumen KSP SMP IT Al-Amanah juga menyingkap sejumlah keterbatasan krusial yang berpotensi mendegradasi kualitas implementasi kurikulum. Sekolah ini masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas penunjang akademik, seperti belum tersedianya laboratorium sains yang representatif, ketiadaan ruang perpustakaan permanen, serta minimnya sarana pendukung yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Faktor kendala ini diperparah oleh keterbatasan kuantitas pendidik serta variasi latar belakang akademik guru yang belum merata. Akibatnya, diferensiasi pembelajaran dan pemanfaatan platform digital instruksional belum berjalan secara koheren. Keberhasilan transisi kurikulum bukan soal keindahan konseptual dokumen kebijakan. Namun hal tersebut tidak cukup. Aspek yang menentukan justru tiga hal lain yakni kesiapan modal manusia (*human capital*), kecukupan infrastruktur, dan daya dukung budaya organisasi sekolah. Realitas inilah yang sebenarnya sangat berpengaruh daripada hanya sekadar dokumen kebijakan.

Keberadaan SMP IT Al-Amanah di dalam ekosistem pesantren dengan sosio-kultural masyarakat yang religius sebenarnya memberikan peluang strategis (*strategic leverage*). Kondisi lingkungan ini memfasilitasi sekolah untuk melakukan hibridasi antara dimensi Profil Pelajar Pancasila dengan nilai-nilai karakter islami melalui tiga saluran utama, meliputi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Konvergensi nilai ini diyakini dapat memperkuat karakter peserta didik secara holistik, terutama pada dimensi keimanan, akhlak mulia, gotong royong, tanggung jawab, serta kepekaan sosial. Kendati demikian, integrasi ini memerlukan kajian kritis untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan kurikulum yang bersifat nasional-sekuler dapat diadaptasikan dan diselaraskan dengan identitas serta kekhasan lembaga pendidikan Islam terpadu tanpa kehilangan esensinya.

Penerapan Kurikulum Merdeka bukan sekadar pemenuhan tuntutan administratif atau birokratis. Pemahaman sempit semacam ini justru perlu diluruskan sejak awal. Sebaliknya, proses tersebut perlu dimaknai sebagai sebuah upaya transformasi instruksional yang bersifat multidimensi, di mana aspek filosofis, pedagogis, sosial, hingga kapasitas kelembagaan saling berkelindan. Berangkat dari pemahaman itulah, kajian mendalam terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi untuk diimplementasikan. Adapun kajian ini diarahkan guna memetakan sejauh mana keselarasan antara rancangan kurikulum dengan kenyataan pembelajaran yang berlangsung di kelas, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang mempercepat maupun menghambat pelaksanaannya. Pada akhirnya dapat dirumuskan sebuah model pengembangan kurikulum kontekstual yang relevan diterapkan bagi sekolah Islam terpadu di Indonesia. Secara teoretis, temuannya diharapkan memperkaya khazanah keilmuan dalam pengembangan kurikulum. Penelitian ini juga memberi manfaat dalam praktik. Tidak hanya untuk kepentingan akademik, temuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah, tenaga pendidik, serta para pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan saat mengevaluasi maupun menyempurnakan pelaksanaan Kurikulum Merdeka sehingga penerapannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Dari uraian di atas, muncul satu arah yang jelas bagi penelitian ini. Yang menjadi perhatian utama penelitian ini ialah bagaimana Kurikulum Merdeka dijalankan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama. Untuk itu, proses implementasinya dianalisis secara kritis sehingga berbagai dinamika yang muncul dapat dipahami secara lebih mendalam. SMP IT Al-Amanah, Kabupaten Ciamis dipilih sebagai lokasi studi kasus. Lewat kajian ini, rekomendasi pengembangan kurikulum yang kontekstual, adaptif, sekaligus berkelanjutan diharapkan dapat disusun. Tujuan besar tersebut perlu diurai menjadi langkah-langkah konkret. Ada empat tahapan analisis yang ditempuh dalam penelitian ini. Pertama, landasan filosofis dan teoretis Kurikulum Merdeka di jenjang SMP ditelusuri. Kedua, struktur serta komponen kurikulum yang diterapkan di SMP IT Al-Amanah dikaji satu per satu. Ketiga, pelaksanaannya ditelaah pada empat aspek yang terdiri dari pembelajaran, asesmen, P5, dan pengintegrasian nilai-nilai keislaman. Selain tahapan yang telah disebutkan, terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk merumuskan rekomendasi pengembangan kurikulum disusun rekomendasi yang aplikatif sesuai kebutuhan lapangan.

Sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu ini, kajian pustaka seputar implementasi Kurikulum Merdeka pun mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam lanskap riset pendidikan di Indonesia. Penelitian terdahulu telah menyoroti beragam domain ini mulai dari kesiapan tenaga pendidik, pola artikulasi pembelajaran berdiferensiasi hingga dinamika perwujudan P5. Evaluasi terhadap kebijakan kurikuler pada beragam jenjang persekolahan pun menjadi cakupan yang dikaji. Meski demikian, sebagian besar dari studi-studi tersebut masih bercorak generalis dan belum menelaah secara mendalam konteks Sekolah Islam Terpadu (SIT), terlebih yang beroperasi di kawasan pedesaan dengan corak sosial-keagamaan yang khas.

Terkait dengan dinamika penerapan Kurikulum Merdeka, berbagai kajian pustaka turut mengonfirmasi bahwa proses adopsinya tidak terlepas dari capaian positif sekaligus kendala yang bersifat struktural. Kurikulum Merdeka terbukti mendorong peningkatan mutu pembelajaran secara signifikan (Saely & Sukiman, 2023). Peningkatan ini tidak datang begitu saja. Bahkan kurikulum ini dikembangkan dengan

pendekatan yang lebih luwes. Pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu ciri utamanya. Penguatan karakter pun tetap mendapat perhatian melalui nilai-nilai yang tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila. Riset yang sama mengungkap korelasi linear antara efektivitas pelaksanaan kurikulum dan tingkat kompetensi guru. Semakin kompeten guru dalam membangun pembelajaran yang berpusat pada siswa, semakin efektif pula kurikulum ini berjalan. Meski demikian, perlu dicatat bahwa kajian ini masih terbatas pada tataran analisis kebijakan secara umum, sementara variabel kondisi kelembagaan serta karakteristik kultural yang melekat pada masing-masing sekolah formal belum turut dielaborasi secara mendalam.

Di sisi lain, hambatan pedagogis menjadi sorotan utama dalam beberapa temuan. (Zendrato & Agatha, 2023) yang mengidentifikasi bahwa rendahnya kapasitas guru dalam menyusun perangkat kurikuler, mengoperasikan asesmen autentik, dan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi menjadi determinan utama penghambat kurikulum. Studi mereka menunjukkan bahwa sepertiga dari populasi guru masih mengalami disonansi konseptual terkait prinsip dasar Merdeka Belajar yang mengindikasikan bahwa intervensi peningkatan kapasitas pedagogis masih menjadi urgensi nasional. Hambatan transisional ini diperkuat oleh (Prasetia et al., 2024), yang menyoroti rigiditas guru dalam bermigrasi dari paradigma konvensional (*teacher-centered*) menuju ekosistem pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Menurut mereka, determinasi perubahan ini mensyaratkan adanya restrukturisasi budaya akademik sekolah, pendampingan profesional, dan pelatihan yang simultan.

Selain faktor kompetensi pendidik, variabel infrastruktur dan konteks wilayah turut memengaruhi keberhasilan adopsi kurikulum. (Hunaepi & Suharta, 2024) memetakan pengaruh disproporsi digital terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di kawasan pedesaan. Keterbatasan aksesibilitas jaringan internet, kelangkaan perangkat mutakhir, serta minimnya platform digital di wilayah rural terbukti memitigasi efisiensi pembelajaran berdiferensiasi dan digitalisasi asesmen. Secara makro, (Fatmala et al., 2025) Kurikulum Merdeka diposisikan sebagai instrumen strategis guna memulihkan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) pasca pandemi COVID-19 melalui kerangka kerja yang adaptif dan fleksibel. Keberhasilan mitigasi ini diyakini

memerlukan sinergisitas multidimensional antara regulasi pemerintah, kesiapan aktor sekolah, fasilitas penunjang, dan keterlibatan kolektif pemangku kepentingan.

Dalam ruang lingkup institusi berbasis agama Islam, (Ariyadi et al., 2024) ditemukan bahwa konvergensi nilai-nilai keislaman dengan struktur Kurikulum Merdeka memberikan stimulasi positif terhadap internalisasi karakter peserta didik. Sayangnya, studi tersebut masih terjebak pada tataran konseptual-teoretis integrasi nilai dan belum mengeksplorasi realitas empiris di satuan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan problem keterbatasan sumber daya, disparitas kesiapan guru, serta efektivitas riil penerapan P5 di lapangan.

Fenomena reformasi kurikulum di Indonesia ini sejalan dengan diskursus pendidikan global mengenai kurikulum berbasis kompetensi. (Fullan, 2020) menegaskan bahwa transformasi kurikuler yang substantif tidak akan tercapai semata-mata melalui rekonstruksi dokumen formal, melainkan menuntut reorientasi budaya organisasi sekolah, kepemimpinan instruksional yang kuat, serta pengayaan kapasitas guru yang berkelanjutan. Desain kurikulum abad ke-21 tidak bisa lepas dari empat kapabilitas inti yakni dalam hal berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi (OECD, 2023). Namun terdapat satu prinsip lain yang menjadi penting, yaitu internalisasi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learning*). Prinsip ini hanya dapat tertanam lewat pendekatan kontekstual, pendekatan yang akomodatif terhadap keunikan kebutuhan tiap peserta didik.

No.	Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Saely & Sukiman (2023)	Implementasi Kurikulum Merdeka	Ruang belajar dirancang agar lebih luwes. Peserta didik diberi kesempatan lebih besar untuk mengambil peran aktif selama	Belum mengkaji sekolah Islam terpadu dan implementasi secara komprehensif.

			proses pembelajaran berlangsung.	
2.	Zendrato & Agatha (2023)	Kesiapan guru	Kompetensi guru masih menjadi kendala implementasi.	Tidak mengkaji faktor kelembagaan sekolah.
3.	Prasetia (2024)	Pembelajaran berdiferensiasi	Guru masih mengalami kesulitan mengubah paradigma pembelajaran.	Belum mengaitkan implementasi dengan kondisi sekolah pedesaan.
4.	Hunaepi & Suharta (2024)	Kesenjangan digital	Infrastruktur menjadi hambatan implementasi.	Tidak membahas integrasi nilai-nilai Islam.
5.	Fatmala (2025)	Evaluasi Kurikulum Merdeka	Kurikulum Merdeka efektif sebagai pemulihan pembelajaran.	Masih bersifat makro pada tingkat kebijakan.
6.	Ariyadi (2024)	Sekolah Islam Terpadu	Integrasi nilai Islam memperkuat karakter peserta didik.	Belum melakukan analisis implementasi secara kritis pada satuan pendidikan tertentu.

Telaah diatas terhadap penelitian terdahulu mengungkap sesuatu, ada beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dicermati.

Pertama, soal fokus kajian. Sebagian besar penelitian tentang Kurikulum Merdeka masih berkutat pada implementasi kebijakan secara umum, kesiapan guru, atau pembelajaran berdiferensiasi. Kajian yang mengintegrasikan aspek filosofis, struktur kurikulum, implementasi pembelajaran, asesmen, evaluasi kurikulum, P5 sekaligus dalam satu kajian utuh itu masih jarang ditemukan.

Kedua, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada sekolah negeri atau sekolah umum sehingga karakteristik sekolah Islam terpadu belum banyak menjadi perhatian. Padahal, sekolah Islam terpadu memiliki karakteristik yang berbeda karena mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan keislaman, budaya pesantren, serta pembentukan karakter religius.

Ketiga, sebagian besar penelitian belum mengaitkan implementasi Kurikulum Merdeka dengan kondisi kontekstual sekolah di wilayah pedesaan. Padahal, karakteristik sosial budaya masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kondisi sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum.

Keempat, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan evaluatif terhadap satu aspek tertentu sehingga belum menghasilkan rekomendasi yang komprehensif mengenai pengembangan kurikulum berdasarkan kondisi empiris satuan pendidikan.

Kesenjangan yang telah diuraikan menjadi titik tolak kajian ini. Fokusnya adalah menelaah secara kritis pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah, Kabupaten Ciamis. Beberapa aspek disoroti sekaligus landasan filosofis, struktur kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, P5, integrasi nilai-nilai keislaman, hingga berbagai faktor yang memengaruhi keberlangsungan implementasinya.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua bentuk kontribusi. Keduanya saling melengkapi. *Pertama*, temuan penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian implementasi Kurikulum Merdeka. *Kedua*, hasilnya dapat dijadikan rekomendasi bagi pengembangan Kurikulum Merdeka pada sekolah Islam terpadu terutama yang berada di wilayah pedesaan.

Metode Penelitian

Pemahaman mendalam soal penerapan Kurikulum Merdeka di jenjang SMP didapatkan dengan menempuh pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). SMP IT Al-Amanah, Kabupaten Ciamis, dipilih sebagai objek penelaahan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh orientasi penelitian yang lebih menekankan pada penafsiran fenomena implementasi kurikulum sesuai konteks nyata yang berlangsung di satuan pendidikan, dan bukan dimaksudkan untuk menguji hipotesis maupun mengukur keterkaitan antarvariabel secara kuantitatif. Adapun desain studi kasus dinilai tepat digunakan sebab memberi ruang bagi peneliti untuk menelaah secara menyeluruh karakteristik, dinamika, kekuatan, sekaligus tantangan dalam implementasi kurikulum pada satu fokus penelitian secara mendalam (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* dengan menetapkan SMP IT Al-Amanah di Kabupaten Ciamis sebagai objek kajian. Pemilihan sekolah didasarkan pada karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan Islam terpadu di kawasan pedesaan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka melalui penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun Pelajaran 2025/2026, sekaligus memadukan Kurikulum Merdeka dengan nilai-nilai keislaman. Karakteristik semacam ini dipandang relevan untuk mengungkap kesenjangan antara kebijakan kurikulum pada tataran normatif dengan pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan. Satu dokumen menjadi sumber utama data penelitian ini, di antaranya Kurikulum Satuan Pendidikan SMP IT Al-Amanah Tahun Pelajaran 2025/2026. Dari dokumen tersebut, data karakteristik sekolah, visi, misi, struktur kurikulum, dan beban belajar dihimpun. Data lain pun turut diambil seperti kondisi sarana-prasarana, pengerjaan P5, hingga sumber daya pendidik.

Landasan utama penelitian ini ialah dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) SMP IT Al-Amanah Tahun Pelajaran 2025/2026. Dokumen tersebut diperlakukan sebagai sumber data primer, agar gambaran yang diperoleh lebih utuh dan di dalamnya termuat informasi mengenai karakteristik sekolah, struktur kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, hingga pengembangan kurikulum. Dokumen ini dijadikan rujukan utama mengingat statusnya sebagai dokumen resmi yang menjadi

pedoman penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperluas dasar analisis penelitian. Referensi yang dimanfaatkan berasal dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku pengembangan kurikulum, regulasi pemerintah terkait Kurikulum Merdeka, serta hasil penelitian terdahulu. Masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengulas implementasi kurikulum, ada pula yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, Profil Pelajar Pancasila, atau pengembangan kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penelitian ini mengandalkan dua teknik dalam proses pengumpulan data. Pemilihan keduanya dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih beragam dan mampu mendukung kebutuhan analisis, yaitu studi dokumentasi (*document study*) dan studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi dokumentasi, peneliti melakukan identifikasi, pembacaan, klasifikasi, sekaligus pencatatan terhadap seluruh informasi yang termuat dalam dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan SMP IT Al-Amanah. Ada sembilan aspek yang menjadi sasaran analisis. Sebagian menyangkut fondasi kurikulum itu sendiri, yakni landasan penyusunan, visi dan misi sekolah, struktur mata pelajaran, serta alokasi waktu pembelajaran. Sebagian lain menyangkut pelaksanaannya di lapangan adalah sistem asesmen, kondisi tenaga pendidik, karakteristik peserta didik, aktualisasi P5, hingga sarana dan prasarana sekolah. Di samping itu, studi kepustakaan turut ditempuh guna menghimpun landasan teoretis terkait pengembangan kurikulum, Kurikulum Merdeka, pelaksanaan pembelajaran, teori kurikulum, serta beragam penelitian empiris relevan yang menjadi pijakan dalam melakukan analisis kritis.

Penelitian ini menerapkan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles et al. (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta perumusan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis diawali dengan kegiatan pengumpulan data sebagai dasar untuk tahapan berikutnya. Seluruh informasi dihimpun dari dokumen KSP maupun beragam pustaka ilmiah. Selanjutnya ialah masuk ke tahap kondensasi. Di sini, informasi yang relevan dengan fokus penelitian diseleksi satu per satu. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu antara lain implementasi

kurikulum, landasan filosofis, struktur kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, kesiapan guru, hingga berbagai tantangan dalam implementasinya.

Setelah terklasifikasi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif. Disertai pembahasan komparatif, serta perbandingan temuan dengan teori pengembangan kurikulum maupun penelitian-penelitian terdahulu. Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan keterkaitan antar-temuan yang diperoleh, sehingga menghasilkan interpretasi yang menyeluruh mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah.

Kredibilitas hasil penelitian melalui triangulasi sumber untuk memastikannya. Informasi dari dokumen KSP dibandingkan dengan berbagai regulasi nasional, buku pengembangan kurikulum, serta artikel dari jurnal ilmiah bereputasi yang memberikan pembahasan mengenai praktik penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan tingkat SMP. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik ketekunan pengamatan (*persistent observation*) dengan melakukan pembacaan dokumen secara berulang sehingga setiap temuan dapat dipahami secara kontekstual dan tidak hanya didasarkan pada interpretasi parsial.

Analisis dilakukan secara kritis dengan membandingkan implementasi Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah terhadap kerangka konseptual pengembangan kurikulum, teori konstruktivisme, teori humanistik, model pengembangan kurikulum Tyler, Taba, dan Stenhouse, serta kebijakan nasional mengenai Kurikulum Merdeka. Proses analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara desain kurikulum, implementasi pembelajaran, kondisi empiris sekolah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum sehingga menghasilkan rekomendasi pengembangan kurikulum yang kontekstual, aplikatif, dan berbasis bukti.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kurikulum Merdeka pada SMP IT Al-Amanah

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah memperlihatkan proses adaptasi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam terpadu di lingkungan pedesaan. Dokumen

Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) menunjukkan sesuatu yang menarik. Struktur kurikulum di sekolah ini dibangun dari perpaduan empat unsur, di antaranya adalah pembelajaran intrakurikuler, muatan lokal berupa Bahasa Sunda dan mata pelajaran Fiqih, implementasi P5, serta kegiatan ekstrakurikuler. Penyusunan struktur tersebut mencerminkan upaya sekolah dalam mengakomodasi arah kebijakan nasional sekaligus mempertahankan identitas kelembagaan yang berorientasi pada pembentukan lulusan Kreatif, Unggul, Agamis, Dan Teladan melalui visi KUAT.

Berdasarkan data empiris, pelaksanaan pembelajaran pada kelas VII dan VIII menunjukkan adanya pembagian waktu belajar sebesar 1.188 jam pelajaran untuk kegiatan intrakurikuler dan 360 jam pelajaran untuk P5, sehingga keseluruhan beban belajar mencapai 1.548 jam pelajaran dalam satu tahun. Komposisi tersebut menggambarkan perhatian terhadap pengembangan kemampuan akademik sekaligus penguatan karakter peserta didik. Jumlah beban belajar sebesar itu bukan angka yang bisa dikelola sembarangan. Guru dituntut mengelola pembelajaran secara efektif. Apabila tidak, proses pendidikan berhenti pada pemenuhan administrasi kurikulum semata. Padahal yang diharapkan lebih dari itu, yaitu Pembelajaran dikembangkan dengan mengaitkan materi ajar pada situasi dan pengalaman nyata yang dihadapi peserta didik. Pendekatan ini memudahkan peserta didik memahami konsep pembelajaran sekaligus menyadari relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif pengembangan kurikulum yang dikemukakan Ralph W. Tyler menginterpretasikan pengejawantahan Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah suah mengakomodasi empat komponen pokok pengembangan kurikulum, mencakup tujuan pendidikan (*educational objectives*), pengalaman belajar (*learning experiences*), pengorganisasian pengalaman belajar (*organization of learning experiences*), dan evaluasi (*evaluation*) (Tyler, 1969). Rumusan tujuan pembelajaran tampak pada visi, misi, tujuan sekolah, serta Capaian Pembelajaran (CP) yang menjadi standar penyelenggaraan pendidikan. Pengalaman belajar diwujudkan melalui pembelajaran intrakurikuler dan pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sementara penilaian dilaksanakan dengan menempuh asesmen formatif serta sumatif yang mengacu pada Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Walaupun

keempat komponen tersebut telah terintegrasi dalam struktur kurikulum, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kapasitas pendidik dan ketersediaan fasilitas pembelajaran.

Temuan serupa juga dipaparkan oleh Fatmala et al. (Fatmala et al., 2025), bahwa fokusnya bukan semata pada kebijakan kurikulum, melainkan pada pelaksanaannya di tingkat sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kemampuan satuan pendidikan menerjemahkan kebijakan menjadi pengalaman belajar yang benar-benar terlaksana di kelas. Praktik tersebut harus selaras dengan kebutuhan lingkungan sekolah masing-masing. Maka secara jelas keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah tidak dapat dilepaskan dari tiga hal yang saling terkait, meliputi perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, serta pengalaman belajar yang benar-benar dirasakan oleh peserta didik.

Analisis Struktur Kurikulum dan Capaian Pembelajaran

Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, penerapan Struktur Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah menunjukkan tingkat keluwesan yang jauh lebih besar. Sekolah memiliki keleluasaan penuh. Bukan sekadar mengikuti arahan dari atas, satuan pendidikan dapat menyusun sendiri Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) sesuai kebutuhan mereka. Lebih lanjut, modul ajar dirancang secara mandiri. Begitu juga dengan kegiatan proyek yang konsepnya disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sekaligus mempertimbangkan karakteristik lingkungan pendidikan setempat. Adapun kehadiran mata pelajaran Fiqih sebagai muatan khusus turut mencerminkan upaya sekolah dalam memadukan kebijakan kurikulum nasional dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi identitas khas lembaga tersebut.

Ditelaah dari sudut pandang pengembangan kurikulum, kondisi tersebut sejalan dengan gagasan Hilda Taba mengenai pendekatan *grassroots* atau *bottom-up* dalam penyusunan kurikulum. Dalam pandangan Taba, guru diposisikan sebagai pihak yang memahami secara langsung kebutuhan belajar peserta didik, sehingga memegang peran penting dalam proses pengembangan kurikulum. Adapun wujud nyatanya di SMP IT Al-Amanah dapat dilihat dari proses penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP). Prosesnya tidak berjalan secara masing-masing. Kepala sekolah, guru, komite sekolah,

hingga pengawas pendidikan secara keseluruhan dilibatkan secara aktif. Keterlibatan lintas pihak tersebut pada akhirnya menghasilkan kurikulum yang benar-benar disusun berdasarkan konteks dan kebutuhan riil satuan pendidikan (Hidayat, 2023).

Meski demikian, penerapan fleksibilitas kurikulum tersebut di lapangan tidak sepenuhnya bebas hambatan. Sebagian guru telah mampu menyusun ATP dan modul ajar dengan baik, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan penguatan kompetensi. Variasi kapasitas tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan.. Terdapat sejumlah guru yang telah cakap dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sementara sebagian lainnya masih memerlukan penguatan kompetensi melalui pendampingan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Hal penting yang disoroti dalam temuan ini adalah fleksibilitas kurikulum tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan penopang yang saling berkaitan. Lebih lanjut, kapasitas pendidik harus terus ditingkatkan tanpa henti, sehingga Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara optimal.

Sebagai ringkasan hasil analisis, struktur kurikulum dapat dipetakan sebagai berikut.

Komponen	Temuan	Interpretasi
Capaian Pembelajaran	Berbasis fase	Mendukung pembelajaran berorientasi kompetensi
ATP	Fleksibel	Memerlukan kompetensi guru yang memadai
Muatan Lokal	Bahasa Sunda dan Fiqih	Menguatkan identitas sekolah Islam terpadu
P5	Terintegrasi	Mendukung pembentukan karakter

Mengacu pada data yang telah dipaparkan sebelumnya, fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum tampak menjadi salah satu kekuatan utama penerapan Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah. Seberapa efektif fleksibilitas ini nantinya, keseluruhan kembali pada satu faktor, yaitu kesiapan guru. Kompetensi profesional

merekalah yang menentukan apakah kebijakan kurikulum dapat diterjemahkan ke praktik pembelajaran sehari-hari, atau justru berhenti.

Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

SMP IT Al-Amanah menunjukkan jejak tampak jelas pada pengamalan P5, yaitu melalui tema "Bangunlah Jiwa dan Raganya", sekolah mengimplementasikan proyek bertajuk SIAP, yang mencakup nilai Sikap Disiplin, Inisiatif Hadir, Anti-Bullying, Peduli, dan Kreatif. Pada pelaksanaannya, peserta didik tidak sekadar menjadi pihak pasif. Mereka dilibatkan secara aktif di berbagai tahapan kegiatan mulai dari menyusun jurnal reflektif sendiri, identifikasi persoalan yang dijumpai di lingkungan sekolah, pengembangan infografis, hingga tahap penyampaian hasil proyek yang telah dikerjakan.

Apabila ditelaah melalui perspektif Lawrence Stenhouse, pengaplikasian P5 tersebut merefleksikan pemaknaan kurikulum sebagai proses (*curriculum as process*) yakni kurikulum yang dipahami sebagai perangkat dokumen perencanaan, serta diwujudkan secara nyata melalui pengalaman belajar yang dialami peserta didik. Melalui berbagai aktivitas, mulai dari penyelidikan, pertukaran gagasan, refleksi atas pengalaman, hingga penyelesaian permasalahan yang bersifat kontekstual, peserta didik memperoleh keleluasaan untuk membangun pengetahuannya secara aktif. Proses pembelajaran semacam ini pada gilirannya turut mendukung pengembangan sejumlah keterampilan penting, seperti berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, komunikasi, serta kreativitas yang kesemuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kompetensi abad ke-21 (Poulton & Golledge, 2024).

Kendati demikian, temuan kajian ini turut mengungkap bahwa konkretisasi P5 di lapangan masih dibayangi oleh kendala berupa terbatasnya sarana pendukung pembelajaran. Tidak tersedianya fasilitas permanen, seperti laboratorium dan perpustakaan, pada akhirnya turut membatasi keragaman bentuk kegiatan proyek yang sesungguhnya dapat dikembangkan. Menghadapi kondisi tersebut, para guru pun lebih banyak memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, baik sebagai media maupun sumber belajar alternatif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengoperasian P5 berkaitan dengan kualitas rancangan proyek yang disusun, serta dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas dan infrastruktur pendidikan sebagai faktor pendukung keberlangsungan pembelajaran berbasis proyek.

Kesiapan Guru dan Dukungan Sumber Daya

Kapasitas pedagogik guru menjadi determinan penting dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, yaitu kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ketika berbicara mengenai kesiapan, hal ini tidak hanya merujuk pada pemenuhan syarat administratif atau ijazah semata, melainkan pada sebuah sinergi antara kualifikasi akademik dan integritas profesionalisme yang melekat pada diri seorang pendidik. Keduanya merupakan fondasi yang tidak bisa ditawar dalam sebuah lembaga pendidikan.

Jika seorang pendidik ditempatkan di luar kompetensi atau kualifikasi dasarnya, rantai proses pembelajaran akan mengalami distorsi. Kurikulum yang dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi siswa justru akan menjadi beban administratif yang kaku karena guru kesulitan menerjemahkannya ke dalam praktik yang relevan. Guru harus mampu bertransformasi dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator yang kreatif. Banyak pendidik yang masih terjebak pada cara pandang lama, di mana kurikulum dipandang sebagai target yang harus diselesaikan daripada sebuah peta jalan yang harus dihidupkan. Kesenjangan antara latar belakang pendidikan dengan kemampuan untuk mengadaptasi metode pembelajaran modern inilah yang menjadi tugas yang besar.

Pada akhirnya, kebijakan secanggih apa pun tidak akan membuahkan hasil jika tidak ada kemauan untuk melakukan refleksi diri dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Guru perlu menyadari bahwa profesionalisme adalah proses yang dinamis; ia tidak berhenti saat gelar akademik disandang. Keberhasilan Kurikulum Merdeka bergantung pada kesiapan guru yang ditunjang kompetensi akademik dan kapasitas pedagogik. Bekal tersebut memungkinkan guru menyesuaikan strategi belajar dengan karakteristik peserta didik serta dinamika pendidikan yang terus berkembang. Kurikulum Merdeka menyediakan arah pengembangan pembelajaran, sedangkan

kualitas hasil yang dicapai dipengaruhi oleh kemampuan guru mengadaptasi kebijakan ke dalam pengalaman belajar yang relevan.

Salah satu lembaga pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka sebagai acuan pembelajaran adalah SMP IT Al-Amanah. Merujuk pada dokumen KSP, SMP IT Al-Amanah tercatat memiliki sebelas tenaga pendidik, yang sebagian besar di antaranya telah berkualifikasi Strata Satu (S1), sementara beberapa guru pengampu muatan lokal masih dalam proses menempuh pendidikan tinggi. Komposisi demikian mengindikasikan bahwa sekolah sesungguhnya memiliki modal kapasitas akademik yang cukup memadai sebagai landasan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Meski demikian, kapasitas akademik tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kematangan pada aspek pedagogik. Masih terdapat pekerjaan rumah untuk guru seperti halnya pembelajaran berdiferensiasi, asesmen autentik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga penyusunan modul ajar berbasis kompetensi semuanya butuh peningkatan lebih lanjut. Lebih lanjut, penelitian dari Prasetya (Prasetya et al., 2024) menegaskan hal serupa, baginya kompetensi profesional guru adalah faktor krusial dalam mengaktualisasikan kebijakan Kurikulum Merdeka pada proses pembelajaran.

Lebih lanjut, Ketersediaan sarana dan prasarana turut menentukan efektivitas Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan. Dukungan fasilitas yang memadai memungkinkan guru mengembangkan strategi belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan kurikulum. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya pembelajaran dapat membatasi variasi aktivitas belajar serta mengurangi capaian yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi peserta didik. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses transformasi pembelajaran yang dicanangkan dalam kurikulum sering kali mengalami hambatan di tingkat operasional.

Kondisi tersebut secara nyata dapat diamati di SMP IT Al-Amanah, sebuah lembaga pendidikan yang juga mengacu pada Kurikulum Merdeka. Hingga saat ini, sekolah tersebut tercatat belum memiliki laboratorium IPA maupun perpustakaan permanen. Selain itu, sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran lainnya juga belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini dikhawatirkan dapat menggerus efektivitas pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Melalui model tersebut, secara esensial menuntut ketersediaan media, alat praktik, serta ragam sumber belajar yang memadai agar siswa dapat mengeksplorasi pengetahuannya secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan dukungan sumber daya menjadi tugas utama yang harus diselesaikan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Penerapan Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah secara umum telah selaras dengan paradigma konstruktivisme, humanisme, serta pemikiran Tyler, Taba, dan Stenhouse. Hal ini menegaskan bahwa kurikulum semestinya tidak sebatas seperangkat materi yang wajib dituntaskan. Kurikulum diposisikan sebagai sarana yang berfungsi untuk memfasilitasi terbentuknya kompetensi peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna.

Beranjak dari sisi praktis, sejumlah implikasi penting dapat ditarik dari penelitian ini. *Pertama*, penguatan kompetensi guru menjadi hal yang perlu diprioritaskan sekolah, baik melalui pelatihan maupun pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, terutama menyangkut pembelajaran berdiferensiasi, asesmen autentik, serta penyusunan modul ajar. *Kedua*, perihal sarana dan prasarana. Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungannya, karena tanpa hal tersebut, implementasi Kurikulum Merdeka sulit berjalan optimal. *Ketiga*, terkait dengan P5. Pelaksanaan evaluasinya harus berkala dengan indikator yang benar-benar terukur, yaitu dengan tujuan pencapaian pengembangan karakter peserta didik, yang tidak terhenti hanya pada batas administratif program.

Pada akhirnya, dapat ditarik pemahaman bahwa SMP IT Al-Amanah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Kurikulum Merdeka. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pembelajaran intrakurikuler, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan nilai-nilai pendidikan Islam, yang ketiganya terintegrasi menjadi satu kesatuan. Meski demikian, capaian tersebut tidak lantas terlepas dari sejumlah hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kesiapan pedagogik guru, hingga perlunya penguatan sistem evaluasi

kurikulum. Efektivitas Kurikulum Merdeka berkaitan erat dengan keterpaduan peran seluruh unsur sekolah dalam mendukung proses pembelajaran, pemerintah, serta masyarakat, agar pengembangan kompetensi abad ke-21 dapat terwujud secara optimal.

Simpulan

Secara umum, kajian mengungkap Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah Kabupaten Ciamis telah diterapkan dengan cukup terstruktur. Hal ini ditunjukkan dari penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP). Di dalamnya, elemen-elemen dipadukan secara berkesinambungan, mencakup pembelajaran intrakurikuler, P5, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta muatan lokal berbasis pendidikan Islam. Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana pihak sekolah berupaya mengadaptasikan kebijakan Kurikulum Merdeka dengan karakteristiknya sebagai Sekolah Islam Terpadu (SIT), sehingga pengembangan kompetensi peserta didik dapat berjalan beriringan dengan pembentukan karakter religius yang menjadi bagian dari visi kelembagaan.

Ditinjau dari struktur kurikulumnya, unsur-unsur utama Kurikulum Merdeka sudah terakomodasi dengan baik. Hal ini tercermin dengan adanya Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen berbasis Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP), serta pelaksanaan P5. Di samping itu, hadirnya mata pelajaran Fiqih sebagai muatan lokal turut memperkuat identitas sekolah sekaligus menjadi representasi dari perpaduan antara kebijakan kurikulum nasional dengan nilai-nilai keislaman.

Adapun dari sisi proses pembelajaran, arahnya jelas berpusat pada peserta didik. Ini terlihat dari kegiatan proyek, refleksi, kolaborasi sampai tugas berbasis penyelesaian masalah yang bersifat kontekstual. P5 bukan sekadar program tambahan, pelaksanaannya berkontribusi terhadap penguasaan kompetensi abad ke-21 serta pembentukan karakter peserta didik. Terintegrasinya nilai-nilai Islam dalam beragam aktivitas pembelajaran menjadi pembeda utama implementasi Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya.

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tersebut tidak terlepas dari komitmen sekolah, keterlibatan guru dalam penyusunan KSP, budaya sekolah yang sejalan dengan pendidikan karakter, serta lingkungan sosial yang bernuansa religius.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ketersediaan sarana pembelajaran masih menjadi aspek yang membatasi efektivitas Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah. Kondisi ini tercermin dari belum optimalnya fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang membatasi ragam pengalaman belajar peserta didik. Di samping itu, penguatan kompetensi guru masih diperlukan, terutama pada pembelajaran berdiferensiasi, asesmen autentik, penyusunan modul ajar, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Amanah sudah merepresentasikan keselarasan antara arah kebijakan nasional dan kebutuhan pengembangan sekolah Islam terpadu. Namun, efektivitasnya juga ditentukan oleh hal lain, yaitu kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan pengembangan profesional guru. Dengan demikian, diperlukan sinergi yang berkesinambungan antara sekolah, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, agar tujuan peningkatan mutu pendidikan sekaligus pembentukan karakter peserta didik dapat terwujud secara optimal.

Saran

Bertolak dari temuan penelitian, pihak sekolah disarankan untuk terus mengupayakan penguatan kapasitas profesional guru, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun pembentukan komunitas belajar yang berkelanjutan. Penguatan tersebut hendaknya mencakup kemampuan dalam menyusun perangkat ajar, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan asesmen autentik, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

Di sisi lain, pemerintah daerah bersama para pemangku kebijakan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dukungannya terhadap penyediaan sarana dan prasarana, mencakup laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, hingga infrastruktur teknologi informasi, sehingga pembelajaran berbasis proyek dapat terselenggara secara optimal sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka.

Lebih lanjut, sekolah selalu rutin mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka yang seharusnya dapat melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah

hingga para *stakeholder* lainnya. Evaluasi tidak berhenti pada urusan administrasi saja. Terdapat hal-hal yang penting untuk dievaluasi, yaitu peningkatan mutu proses pembelajaran, dan efektivitas pengejawantahan P5, serta penguatan integrasi nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk peneliti selanjutnya, kajian mendatang diharapkan dapat berbasis lapangan secara langsung dengan observasi pembelajaran yang dapat dipadukan dengan wawancara terhadap para guru, kepala sekolah, peserta didik, hingga orang tua sebagai narasumber sehingga didapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, gambaran empiris implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Islam Terpadu (SIT) bisa didapat secara lebih komprehensif. Selanjutnya, kajian komparatif pada sekolah-sekolah dengan karakteristik yang berbeda juga perlu dilakukan, guna mengidentifikasi variasi implementasi yang terjadi sekaligus merumuskan model Kurikulum Merdeka yang lebih kontekstual, adaptif, dan selaras dengan beragam kondisi satuan pendidikan.

Daftar Rujukan

- Ariyadi, D. H., Prasetya, E. B. N., & Muhtarom, T. (2024). Analisis Perbandingan Kurikulum Antara Negara Indonesia dan Negara Singapura. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 426–433. <https://doi.org/10.70294/jimu.v2i02.385>
- BSKAP. (2022). Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, April*, 118.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Fatmala, S., Lestari, T., Zain, N., & Hilaliyah, T. (2025). Transformasi Pembelajaran: Analisis Kritis Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai Alternatif Pengganti Kurikulum 2013. *Jurnal Basicedu*, 9(1). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i1.9401>
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Hidayat, T. (2023). Development of Local Content Curriculum Based on Pesantren Tahfīz in Mts. Al-Fathimiyah Banjarwati. *At-Turats*, 17(1), 38–48. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v17i1.2416>
- Hunaepi, H., & Suharta, I. G. P. (2024). Transforming Education in Indonesia: The

- Impact and Challenges of the Merdeka Belajar Curriculum. *Path of Science*, 10(6), 5026–5039. <https://doi.org/10.22178/pos.105-31>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative-Data-Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2023). Education Policy Outlook 2023: Empowering All Learners to Go Green. *Education Policy Outlook, 2023*. <https://doi.org/10.1787/F5063653-EN>
- Poulton, P., & Golledge, C. (2024). Future curriculum-makers: The role of professional experience placements as sites of learning about curriculum-making for preservice teachers. *The Curriculum Journal*, 35(4), 652–672. <https://doi.org/10.1002/curj.252>
- Prasetya, U., Malabar, S., & Masie, S. R. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Smp Negeri 2 Wanggarasi Sebagai Sekolah Penggerak. *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan ...*, 14(1), 108–122.
- Saely, E., & Sukiman. (2023). Analisis Kritis Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1). <https://doi.org/10.32585/edudikara.v8i1.316>
- SMP IT AL-AMANA. (2025). *KURIKULUM SMP IT AL-AMANA*.
- Tyler, R. W. (1969). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226820323.001.0001>
- Wraga, W. G. (2017). Understanding the Tyler rationale: Basic Principles of Curriculum and Instruction in historical context. *Espacio, Tiempo y Educación*, 4(2), 227. <https://doi.org/10.14516/ete.156>
- Zendrato, J., & Agatha, D. C. (2023). An Analysis of Merdeka Curriculum Implementation in Indonesia: A Case Study of Facilitating Students' Transformation. *Jurnal Shanan*, 7(2), 227–242. <https://doi.org/10.33541/shanan.v7i2.5188>